TAJUK RENCANA

Penerapan Protokol Kesehatan di Daerah

PEMERINTAH secara resmi telah mengesahkan protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf). Pengesahan tersebut dilakukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/ Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kita tentu menyambut positif keluarnya peraturan tersebut, karena akan menjadi acuan bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah dalam membuat SOP, khususnya di bidang pariwisata. Kiranya perlu diingatkan bahwa KMK ini merupakan payung hukum dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19. KMK tersebut sekaligus juga menepis tudingan sebagian kalangan yang menganggap penanganan Covid-19 tidak satu pintu, tumpang tindih dan sebagainya. Kementerian Kesehatan adalah institusi yang diberi otoritas penuh untuk mengatur standar protokol kesehatan di semua sektor, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meski demikian, dalam penerapannya, KMK ini memberi ruang kepada daerah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, terutama terkait tingkat risiko wilayah penyebaran Covid-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikan Covid-19. Termasuk di DIY, protokol kesehatan di sektor pariwisata tetap mengacu pada KMK tersebut. Seperti diketahui, DIY mulai membuka destinasi wisata secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain melalui pembatasan pengunjung, keharusan memakai masker serta memperbanyak tempat cuci tangan.

Pembatasan ini tentu dilakukan dengan mengingat tingkat risiko penyebaran Covid-19 , terlebih DIY masuk zona kuning, karena masih ditemukan kasus baru Covid-19. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengingatkan, kebangkitan wisata di Kota Yogya tergantung dari terciptanya rasa aman dan nyaman dari pengunjung . Salah satu bentuk jaminan rasa aman dan nyaman tersebut ialah disiplin dalam menerapkan protokol pencegahan penularan virus korona (KR 23/6).

Tentu penilaian tersebut sangat masuk akal dan tidak hanya berlaku di kota Yogya saja, tapi juga daerah lain. Hal ini juga sejalan dengan protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlandaskan pada tiga isu utama, yakni kebersihan, kesehatan dan keamanan. Ketiga isu utama itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Ketiganya tak bisa dipisahkan, karena saling terkait.

Hemat kita, kebangkitan pariwisata di DIY tentu bukan sekadar menyangkut tingkat kunjungan wisatawan semata, melainkan juga terkait dengan sejauh mana pengelola destinasi wisata mampu memberi rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Untuk itulah kita mendorong semua pihak, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata, secara bersama-sama menegakkan dan mengawasi protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Lebih dari itu, untuk kategori wisata alam, meski pemerintah telah memberi lampu hijau untuk dibuka, namun tetap harus hati-hati dan dilakukan secara bertahap. Pengelola destinasi wisata harus mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran Covid-19. ❑ - o

Polemik Komunikasi Listrik

Satria Aji Imawan

KEBIJAKAN pemerintah di era pandemi kembali memunculkan kontroversial. Alih-alih meringankan, pemerintah justru semakin memberi beban tambahan kepada masyarakat berupa kenaikan tarif listrik. Hal ini cukup membuat masyarakat meradang karena kenaikan telah dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Apalagi listrik telah menjadi kebutuhan esensial masyarakat di tengah pandemi untuk bekerja dan belajar dari rumah.

Persoalan ini membuat kita harus melihat kembali meninjau strategi komunikasi kebijakan publik di Indonesia. Sebab, selain dilakukan secara tiba-tiba, kenaikan tarif juga disertai dengan penjelasan minimal pihak PLN terhadap kenaikan. Persoalan ini seolah menjadi hal yang laten ketika kita tahu banyak sekali kebijakan publik yang tidak terkomunikasikan dengan baik, khususnya di era pandemi. Lalu, bagaimana agar hal ini tidak terjadi? Bagaimana seharusnya komunikasi publik dilakukan dalam manajemen tata kelola listrik dilakukan agar keributan-keributan terhadap kebijakan publik tidak terjadi lagi di masa depan?

KR-JOKO SANTOSO

Narasi Tunggal

Strategi komunikasi publik dituliskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang menekankan dua hal. Pertama, komunikasi publik harus disampaikan melalui saluran-saluran komunikasi secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti. Kedua, komunikasi publik harus dikonfirmasi melalui narasi tunggal dan data pendukung lainnya ketika kebijakan publik dikritisi oleh pemerintah.

Secara tidak sadar, polemik kenaikan tarif listrik bersumber kepada dua hal ini. Persoalan pertama adalah adanya komunikasi publik yang kurang baik sehingga masyarakat kaget ketika tarif naik. Persoalan ini diperparah oleh tidak adanya konfirmasi narasi tunggal dan data dukung yang dilakukan. Padahal, listrik adalah barang semi publik. Regulasi PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa barang semi publik dikelola melalui APBN dan/atau APBD sebagai sumber penggerak dengan badan usaha sebagai institusi penggeraknya.

Untuk mengatasi ini, PLN dapat memanfaatkan media sosial sebagai strategi komunikasi publik yang efektif untuk menjelaskan kebutuhan akan manajemen pelayanan listrik dan daya beli masyarakat. Pemanfaatan ini harus tepat dengan bahasa yang mudah dipahami segala lapisan masyarakat di Indonesia. Penggunaan media sosial yang tinggi ketimbang akses kepada berita konvensional maupun digital juga harus dilihat PLN sebagai peluang strategi komunikasi.

Belajar

PLN dapat belajar pada Kemen PUPR. Dalam mengkomunikasikan kebijakannya, Kemen PUPR kerap menggunakan saluran media sosial berupa Instagram, Facebook, dan Twitter dengan tagar #SahabatPUPR. Dalam kanal-kanal media tersebut, Kemen PUPR kerap memaparkan rencana-rencana kebijakan di bidang PUPR, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Metode ini cukup efektif ketika data memperlihatkan banyaknya masyarakat yang mengikuti berita-berita media sosial Kemen PUPR melalui Like, Comment, dan Share.

Barangkali, pemanfaatan media sosial dapat menjadi refleksi bagi pemerintah di dalam mengkomunikasikan kebijakan tarif listrik. Perlu dilihat bahwa aspek kepublikan di dalam pelayanan listrik menjadikan masyarakat sebagai mitra di dalam kebijakan publik. Sehingga, ketika melaksanakan kebijakan pelayanan listrik maka masyarakat harus dilibatkan. Masyarakat harus benar-benar dilihat sebagai pelanggan ketimbang pengguna. Status pelanggan membuat masyarakat berhak memperoleh informasi awal ketika kebijakan tarif listrik. Dengan adanya langkah ini, masyarakat dapat melakukan langkah-langkah antisipatif sebagai respons atas perubahan kebijakan. ❑ - o

*) ***Satria Aji Imawan MPA**, Asisten Dosen Pascasarjana Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email *pikiranpembaca@gmail.com.* Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Semua Dilakukan di Rumah

TAHUN ajaran 2019/2020 penuh tantangan, khususnya semester genap. Hal ini dikarenakan mulai Maret semua aktivitas kehidupan berubah total. Semua kegiatan berpusat dari rumah seperti: bekerja, sekolah, dan kuliah. Kesehatan begitu diperhatikan untuk mencegah penularan Covid-19. Semua protokol kesehatan dilakukan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan dan semua kegiatan dikendalikan dari rumah. Alat komunikasi yang menjadi andalan adalah HP. Semua kalangan menggunakan.

Saat ini orangtualah yang berperan sebagai guru pendamping anak sewaktu belajar di rumah, baik membantu menjelaskan pelajaran yang belum dipahami anak, mengoreksi tugas anak, mengirim tugas anak, menjadi pengawas dan guru BP. Jika anak malas belajar harus memberi semangat agar anak terus belajar. Orangtua adalah guru, benar terjadi dan teruji sekarang. Tanpa orangtua dengan semua fasilitas, kegiatan belajar mengajar jarak jauh tidak terjadi. Selama empat sampai enam bulan waktu belajar di semester genap dilakukan di rumah. Guru tidak bisa memantau langsung kegiatan anak, orangtua menjadi kepanjangan tangan, mata, dan mulut guru.

Hingga akhirnya tiba waktunya untuk menerima rapor. Banyak hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengolah nilai rapor yang harus dilaporkan kepada orangtua siswa. Pada saat pembelajaran normal, guru sudah biasa dan dapat melihat langsung proses anak dalam belajar, tapi sekarang guru hanya memantau lewat media sosial. Hal itu membuat guru merasa bersalah, galau, sedih, semua bercampur aduk.

Lalu nilai berapa yang harus tertulis di rapor anak-anak. Pertimbangan demi pertimbangan harus digunakan untuk mendapatkan nilai yang pas. Cara penyerahan hasil belajarnya pun diserahkan kebijakan sekolah. Ada yang dikirim lewat media sosial ataupun dibagikan langsung dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian juga dengan orangtua siswa, karena keterbatasan fasilitas dan mungkin keterbatasan pengetahuan, karena tidak semua orangtua mempunyai tingkat pendidikan yang sama, hal itu akan membawa pengaruh bagi pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Tapi lepas dari itu semua, senang maupun tidak senang, semua harus kita lakukan dan tetap bersyukur agar kita bisa ikhlas menjalani. Kita lihat sisi positifnya saja, bisa lebih punya waktu buat keluarga, tahu perkembangan anak, lebih akrab dengan tetangga, belajar dan bekerja di mana pun kita berada. ❑ - o

Tri Widaningrum
Guru SDN Sardonoharjo 1, Sleman.

80 Tahun Keuskupan Agung Semarang

Agus Tridiatno

PADA tanggal 25 Juni 2020, Gereja Keuskupan Agung Semarang genap berusia 80 tahun. Keuskupan Agung Semarang (KAS) meliputi sebagian wilayah Jawa Tengah dan seluruh wilayah DIY. Semula ia berada di dalam tata penggembalaan Prefektur Apostolik Batavia (Jakarta). Pada tanggal 25 Juni 1940, ia dilepaskan dari Prefektur Apostolik Batavia, lalu berdiri sendiri sebagai Vikariat Apostolik Semarang. Mgr Albertus Soegijapranata diangkat menjadi uskup di Semarang. Pada saat hirarki gereja di Indonesia telah terbentuk, pada tanggal 3 Januari 1961, ia berubah status menjadi Keuskupan Agung Semarang (*Archdiocese of Semarang*).

Awal mula hadirnya Agama Katolik di Jawa tahun 1640, ketika Sultan Mataram memberikan sebidang tanah kepada dua imam Dominikan, yaitu Manuel de St Maria OP dan Pedro de St Joseph OP, untuk melayani umat Katolik yang terdiri para pedagang Portugis di Jepara. Tahun 1808, Semarang menjadi stasi dari Prefektur Apostolik Batavia (Jakarta). Selanjutnya, Ambarawa, Yogyakarta, dan Magelang menjadi stasi-stasi baru. Kedatangan Romo Van Lith, SJ dan mendirikan sekolah guru di Muntilan tahun 1904 berpengaruh besar bagi pengembangan iman Katolik. Pendekatan budaya Jawa yang dilakukan Romo Van Lith sangat cocok bagi masyarakat Jawa.

Kekhasan

Pendekatan budaya Jawa inilah yang dikembangkan dan menjadi kekhasan Gereja Keuskupan Agung Semarang. Bahasa Jawa terus dikembangkan dan digunakan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa peribadatan. Meskipun di kota-kota banyak pendatang dari luar Jawa dan banyak anak-anak muda yang sudah tidak fasih berbahasa Jawa, Bahasa Jawa tetap dipelihara dan digunakan dalam peribadatan sampai sekarang. Bahkan bisa dikatakan bahwa salah satu penjaga dan pelestari Bahasa Jawa adalah Gereja Keuskupan Agung Semarang.

Sejak tahun 1960-an sudah dilakukan pelbagai eksperimen untuk mengangkat musik gamelan Jawa menjadi musik liturgi. Tokoh-tokoh gamelan Jawa seperti Hardjasoebrata (pencipta lagu Gundul-gundul Pacul), Hardjawardaya, Sukodi dll. mencipta lagu-lagu bergaya gamelan untuk dipakai dalam peribadatan. Ternyata, musik gamelan Jawa sangat pantas dan layak untuk peribadatan. Maka, gamelan Jawa sangat berkembang dalam Gereja Keuskupan Agung Semarang hingga sekarang. Usaha inilah yang merupakan realisasi dari inkulturasi gereja yang dicanangkan oleh Konsili Vatikan II.

Pada masa pandemi Covid 19, Keuskupan Agung Semarang mengembangkan gerakan 'Keuskupan Agung Semarang Peduli Negeri'. Umat didorong untuk melakukan kegiatan berbagi dan solider dengan warga yang terdampak oleh pandemi ini. Gereja memfasilitasi usaha-usaha umat yang terhambat karena harus bekerja dari rumah dengan menyalurkan masker, APD dll. Paroki-paroki membagikan bantuan kebutuhan sembako bagi umat yang membutuhkan.

Perubahan

Kegiatan-kegiatan bersama di tingkat lingkungan yang mengumpulkan banyak orang tidak boleh dilakukan. Maka harus dilakukan perubahan-perubahan modus kegiatan, misalnya saling menyapa secara daring atau melalui video. Meskipun sebelum pandemi peribadatan secara daring) tidak diterima secara lazim.

Gerakan peduli negeri sudah menyejarah di KAS. Mgr. Albertus Soegijapranata telah memelopori. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional karena turut berjasa dalam gerakan kemerdekaan RI melalui diplomasinya. Beliau mendorong umat Katolik untuk terlibat di dalam perjuangan bangsa dan negara. Slogan beliau 'Seratus Persen Katolik, Seratus Persen Indonesia' menjadi pendorong bagi umat untuk tidak ragu-ragu bersikap membela tanah air.

Kata- *Pro Ecclesia et Patria* yang berarti 'Untuk Gereja dan Tanah Air' sangat kuat magisnya untuk mendorong umat Katolik untuk peduli dan beraksi bagi negeri tercinta Indonesia. ❑ - o

***)Dr Agus Tridiatno**, Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Pojok KR

Cegah penularan Covid-19, tingkatkan koordinasi antarwilayah.
*** Pengawasan juga harus diperketat.**

Stok cabai melimpah, petani perlu difasilitasi mesin pengering.
*** Juga perlu dibantu pemasarannya.**

Disiapkan danais Rp 300 miliar untuk pembebasan lahan JJLS.
*** Utamakan musyawarah untuk mufakat.**

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.